

BAB III

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK SURINAME

Republik Suriname (Suriname) adalah sebuah negara bagian di Amerika Selatan, negara ini berbatasan dengan Guyana Perancis di timur dengan Guyana di barat. Sedangkan selatan berbatasan dengan Brasil dan di utara berbatasan dengan Samudra Atlantik. Republic Suriname memiliki luas wilayah meliputi 63.036 mil persegi atau 163.265 km², dengan panjang pantai 275 Km. Suriname terletak di bagian tengah wilayah Guyana yang telah terbagi-bagi pada masa colonial. Terbentang antara 02^o-06^oLU dan dari 54^o-58^o BB. Negara Suriname merupakan salah satu wilayah yang merupakan bekas ajang perebutan bangsa Eropa, yang sebelumnya bernama daerah Guyana. Daerah Guyana ini diperebutkan oleh bangsa-bangsa Eropa meliputi: Spanyol, Belanda, Inggris, Perancis, dan Portugis. Akibat dari persaingan tersebut, wilayah Guyana saat ini terbagi menjadi lima bagian yaitu: Guyana Espanola (bagian Venezuela sekarang), Inglesia (Guyana sekarang), Holandesa (Suriname), Francesa (Cayenne), dan Poutuguesa (bagian dari wilayah Brazil).⁵¹

A. Pengaruh Belanda Pasca Kemerdekaan di Suriname

Berdiri untuk keadilan, kesederhanaan, dan loyalitas (*Justitia-Pietas-Fides*). Sepenggal beberapa kata yang menjadikannya sebagai motto sebuah negara, yaitu negara Republik Suriname. Suriname adalah sebuah negara yang

⁵¹ Data KBRI Paramaribo, *Sejarah Suriname*, 2005

terletak di Amerika Selatan yang tergabung dalam kawasan Amerika Latin, sedangkan kawasan Amerika Latin sendiri terletak di bagian belahan selatan benua amerika yang terdiri dari tiga sub-kawasan, yakni Amerika Tengah (Central America), lengkungan atau cekungan Karibia (Caribbean Basin), dan Amerika Selatan (South America). Nama "Amerika Latin" yang sekarang lazim digunakan sesungguhnya adalah sebuah sumbangan dari penulis perancis pada abad ke-19 sebagai suatu cara untuk meningkatkan kepemimpinan bangsa Perancis terhadap dunia Khatolik.

Meskipun istilah tersebut secara geografis tidak sepenuhnya tepat dan tidak pula menunjukkan adanya kelompok etnik ataupun budaya yang tinggal bagi seluruh bagian kawasan tersebut, namun istilah Amerika Latin lebih disukai dibandingkan dengan istilah Hispanic America yang dipopulerkan oleh orang-orang Spanyol serta para penulis Spanyol-Amerika namun ditolak oleh masyarakat Brazil dikarenakan pada waktu itu Brazil tidak mengalami penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Spanyol.

Istilah lainnya kawasan tersebut yakni Iberio America dan Indo-Hispanic America, akan tetapi kedua istilah yang terakhir ini tidak populer. Karena besarnya pengaruh Spanyol dan Portugal dalam sejarah Amerika Latin maka kadang dirasa lebih tepatnya digunakan istilah America (Ameriberia) daripada Amerika Latin.⁵² Sebelum Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1498, wilayah yang sekarang disebut Suriname merupakan tempat tinggal dari

⁵² Bambang Wahyu Nugroho, *Studi Amerika Latin*, Diklat kuliah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ilmu Hubungan Internasional. Hal.3-4

suku-suku asli seperti Arawak dan Karibia. Republik Suriname dulunya merupakan negara bekas jajahan Belanda, seperti yang sudah tertulis diatas secara langsung negara tersebut berbatasan dengan Guyana Perancis di Timur dan Guyana di Barat sedangkan selatan berbatasan dengan negara Brazil dan di utara berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik.

Menurut sejarahnya negara Suriname mulai dikenal luas sejak abad ke 15, yaitu ketika bangsa-bangsa imperialis Eropa berlomba-lomba untuk menguasai Guyana. Guyana sendiri merupakan suatu dataran yang luas terletak diantara Samudra Atlantik, Sungai Amazon, Sungai Rio Negro, Sungai Cassiquiare dan Sungai Orinoco. Semula dataran ini oleh ahli kartografi diberi nama Guyana Karibania (Guyana yang berarti dataran luas yang banyak dialiri sungai dan Karibania berasal dari kata Caribs yaitu nama penduduk asli yang pertama kali mendiami dataran tersebut).

Berdasarkan suatu cerita fiktif "El Dorado", Guyana digambarkan sebagai suatu wilayah yang kaya akan kandungan mineralnya berupa emas. Sehingga hal inilah yang menjadikan salah satu faktor alasan oleh orang-orang Eropa untuk berlomba-lomba dan bersaing menguasai Guyana. 1499 pelaut berkebangsaan Spanyol, Alonso de Hojeda dan Juan de la Cosa berlayar sambil menyusuri pantai timur laut Amerika Selatan yang saat itu mereka sebut dengan Wild Coast yang akhirnya mendarat di wilayah Guyana. Vincent Juan Pinzon kemudian menguasai Guyana atas nama Raja Spanyol waktu itu.

Selama antara abad ke 16 dan 17, Guyana mengalami persaingan oleh bangsa Eropa dan dikuasai silih berganti oleh Spanyol, Inggris, Perancis, dan Portugal. Tahun 1530 kemudian Belanda membuka atau mendirikan pusat perdagangan untuk pertama kalinya di daratan tersebut. Terjadinya peristiwa Guyana sebagai ajang perebutan oleh bangsa Eropa mengakibatkan daerah tersebut terbagi menjadi lima wilayah kekuasaan, daerah Guyana sepenuhnya jatuh ke tangan Inggris sejak tahun 1630 hingga pada tahun 1639. Sedangkan negara Suriname sendiri masuk wilayah kekuasaan Inggris pada tahun 1651 setelah terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh Inggris hingga terjadinya penandatanganan perjanjian perdamaian Breda pada tahun 1667, yang berisikan bahwa negara Suriname menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Tahun 1781 hingga 1783 Inggris kembali memasuki Suriname yang kemudian pihak Inggris menjadikannya Suriname sebagai daerah protektoratnya dari tahun 1799 hingga 1802, akan tetapi melalui perjanjian Amiens pada tanggal 27 Maret 1802 wilayah Suriname, Barbice, Demerara dan Essquibo berada dibawah kekuasaan Belanda. Namun setahun kemudian Inggris kembali menguasai wilayah-wilayah tersebut dan sejak 1804 Suriname menjadi koloni Inggris dengan sebutan British Interregnum.

Selama daerah Guyana menjadi ajang perebutan wilayah oleh bangsa Eropa hingga terbagi menjadi beberapa bagian wilayah diantaranya ialah negara Republik Suriname, telah terjadi bermacam-macam peristiwa penyerangan maupun pengalihan kekuasaan hingga terjadinya situasi kemunduran perekonomian di Suriname saat itu, dikarenakan adanya penghapusan atau

pelarangan perdagangan budak untuk dipekerjakan sebagai budak. Hingga selanjutnya melalui perjanjian London pada tanggal 13 Agustus 1814 dan di ratifikasikan dalam perjanjian Wina, bahwa Suriname dikembalikan lagi kepada pihak Belanda yang kemudian pemerintahan Suriname dipimpin langsung oleh seorang gubernur dengan di damping oleh sebuah dewan yang bertugas sebagai penasihat gubernur.⁵³

Hingga pecahnya perang Dunia Pertama tidak memberi pengaruh pada situasi ekonomi-politik negara Suriname, hingga pada tanggal 15 Desember 1954, pemerintah Belanda bersama beberapa wakil dari Suriname menandatangani sebuah memorandum yang isinya rencana pengakhiran penjajahan dan dalam sebuah Konferensi Meja Bundar pada tahun 1961, para wakil Suriname yang dipimpin Perdana Menteri Pengel menuntut dibentuknya sebuah pemerintahan sendiri. Tuntutan tersebut semakin menjadi setelah adanya beberapa partai politik yang dibentuk dan didirikan yang bertujuan menyampaikan tuntutan agar Suriname diberikan kebebasan secara keseluruhan.⁵⁴

Tanggal 25 November 1975 Suriname mendapatkan kemerdekaannya setelah diadakan konferensi membahas tentang pelepasan dari Belanda dan mendapatkan pengakuan pertama kali kemerdekaan tersebut dari negara lain yaitu Indonesia, akan tetapi sistem perekonomian negara tersebut masih tergantung dan dibawah pengawasan pihak Belanda. Stahun setelah kemerdekaan Suriname mengalami kudeta yang dilancarkan pihak militer, peristiwa terjadinya kudeta

⁵³-"Negara Suriname", <http://www.scribd.com/doc/53662322/html>, diakses 09 Maret 2011

⁵⁴ *Ibid.*

tersebut telah mengakibatkan jatuhnya pemerintahan Demokrasi Parlementer pertama sejak kemerdekaan Suriname. Sebagai reaksi terhadap pemberontakan tersebut, pada tanggal 08 Desember 1982 pihak militer melakukan serangkaian pembunuhan terhadap 15 tokoh demonstran. Peristiwa ini mengakibatkan dihentikannya bantuan pembangunan yang dilakukan Belanda kepada Suriname, yang berdampak semakin buruknya kondisi perekonomian negara tersebut. Pemberontakan kudeta pihak militer yang menjadikan militer sebagai pemerintahan negara tersebut diakhiri dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum pada bulan November 1987, yang telah mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada golongan sipil. Selama hampir 26 tahun kemerdekaan, negara Suriname telah mengalami pergantian presiden sebanyak 9 kali.

Negara Suriname memiliki bendera kebangsaan yang terbentuk dari lima warna garis melintang (Hijau, Putih, Merah, Putih, Hijau), dan terdapat sebuah bintang berwarna kuning besar yang mempunyai lima ujung terletak di tengah garis merah. Bendera ini disetujui bertepatan pada tanggal 25 November 1975 yang mempunyai makna, Bintang melambangkan persatuan seluruh kelompok etnis, garis merah diartikan sebagai perjuangan dan kasih sayang, hijau untuk harapan dan kesuburan, dan garis putih untuk perdamaian dan keadilan.⁵⁵

Pengaruh negara lain dalam perpolitikan di Suriname mempunyai pengaruh yang besar, terutama Belanda yang pernah menjajah negara tersebut. Selain mempunyai pengaruh terhadap perpolitikan juga secara langsung mengawasi perkembangan perekonomian di Suriname. Belanda juga memantau

⁵⁵ "Bendera Suriname", http://id.wikipedia.org/wiki/bendera_suriname, diakses 09 Maret 2011.

kondisi politik atau pun hal-hal yang dapat berubah pada sistem pemerintahan Suriname, hal ini apabila ditentang oleh pihak Suriname akan mengakibatkan pemutusan hubungan antar kedua negara jika terjadi sebuah monopoli dalam tubuh pemerintahan Suriname. Besarnya pengaruh Belanda dalam pemerintah di negara Suriname memberikan manfaat positif meskipun sebagian pengaruh tersebut terkadang ada yang tidak sejalan dengan sistem pemerintahan di Suriname.

Sistem pemerintahan Suriname yang berlandaskan pada demokrasi konstitusi, dimana lembaga legislative (Parlemen atau *National Assembly*) dengan memiliki 51 anggota merupakan badan tertinggi yang dimiliki dalam tata pemerintahan Suriname. Sehingga pemerintahan dipegang oleh Presiden yang berpusat di Paramaribo, Presiden sebagai kepala negara. Suriname telah menggunakan sistem demokrasi yang berdasarkan konstitusi pada tanggal 30 September 1987. Politik Suriname sendiri menggunakan rangka republik demokrasi wakil parlementer dan juga menggunakan sistem multi partai, kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintahan, sedangkan kekuasaan legislatif dilakukan oleh majelis dan majelis nasiona, dan kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh eksekutif dan legislatif secara independen.⁵⁶

Karakter perekonomian Suriname adalah ekonomi yang bergantung pada bantuan luar negeri khususnya. Negara Belanda merupakan salah satu yang mempunyai pengaruh setelah Amerika dalam pembangunan perekonomian

⁵⁶ (*State Suriname*, 03/98, U.S. Department of State Background Notes: Suriname, March 1998 Released by the Bureau of Inter-American Affairs, <http://www.suriname.nu/30ges/archi156.html>. Diakses 10 Maret 2011.

maupun politik di Suriname yang selalu berperan secara langsung dalam memberikan bantuan keuangan guna mendukung pelaksanaan program pembangunan di Suriname sejak memperoleh kemerdekaan dari Belanda pada tanggal 25 November 1975. Dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian, Suriname melakukan impor barang-barang kebutuhan dari negara-negara lain, sehingga nilai impor lebih besar dari pada nilai ekspor yang dilakukan Suriname. Perekonomian yang didominasi oleh kekayaan mineral sumber daya alam khususnya bauksit.

Sedangkan produk ekspor utama yang ada adalah alumina, aluminium, minyak mentah, beras, udang, pisang, kayu, dan emas. Negara mitra utama ekspor Suriname antara lain Amerika Serikat, Belanda, Trinidad dan Tobago, The Dutch Antiles, Brazil, Inggris, Venezuela dan Guyana. Sedangkan produk impornya adalah bahan bakar minyak, katun, tepung, daging, susu, bahan baku dan bahan setengah jadi, mesin-mesin, alat transportasi, makanan, serta barang-barang konsumsi lainnya.

Selain pengaruh negara Belanda dalam perekonomian dan politik pemerintahan di Suriname pasca Kemerdekaan, tidak lain halnya juga dalam penggunaan bahasa nasional yang juga sebagian besar mengutamakan pemakaian bahasa Belanda, meskipun dalam prakteknya sehari-hari ada percampuran bahasa dengan bahasa yang lain. Selain itu pengaruh budaya Belanda yang terlihat pada struktur bangunan rumah maupun gedung pemerintahan yang berdesign Belanda, ini dikarenakan Suriname selama masa kemerdekaan dibantu pihak Belanda dalam tahap pembangunan gedung pemerintahan. Hal ini dikarenakan sewaktu

kemerdekaan Suriname menandatangani persetujuan dengan Belanda dan menyediakan sekitar 1,5 milyar dollar sebagai pinjaman untuk dana pengembangan dalam jangka waktu periode 10 sampai 15 tahun.

Namun hal tersebut mengalami kendala dengan adanya peristiwa kudeta pihak militer Suriname. Setelah pemerintahan kembali menjadi demokrasi dan melaksanakan pemilu pada tahun 1991, pihak Belanda kembali memberikan bantuan kepada Suriname. Hubungan dengan Belanda berlanjut menjadi faktor penting dalam ekonomi Suriname, sehingga Suriname memberikan rencana perekonomiannya kepada Belanda untuk dilakukan sesuai saran dari Belanda agar perekonomian Suriname dapat lebih baik dari sebelumnya. Pada tanggal 1 Januari 1999, pemerintah Suriname memberlakukan suatu kebijakan yang disebut *Marktconforme Koers* yang bertujuan untuk menyesuaikan nilai tukar mata uang sesuai pasar dengan bank sentral bertindak sebagai pengendali. Kebijakan ini diambil untuk menyeimbangkan antara nilai tukar mata uang resmi (bank) dan nilai tukar yang berlaku di pasar (Money Changer atau pasar gelap).

Akan tetapi kebijakan tersebut ternyata kurang memenuhi sasaran, karena sampai pertengahan bulan Mei 1999 nilai tukar mata uang yang berlaku di pasaran semakin tidak terkendali. Ketidakstabilan nilai mata uang setempat terhadap dollar AS menimbulkan ketidakpastian yang mengakibatkan adanya kelesuan dan terpuruknya dalam dunia usaha. Akibat kondisi tersebut telah memperburuk sektor perekonomian, harga-harga beberapa barang dan jasa dibuat dalam dollar AS telah mengalami kenaikan yang luar biasa.

B. Hubungan Bilateral Indonesia dan Suriname

Hubungan bilateral Indonesia dengan Suriname sudah dimulai sejak bulan Agustus 1951, ketika Suriname masih berada dalam pemerintah penjajah Belanda, dengan membuka kantor perwakilan pada tingkat Komisariat di distrik Paramaribo. Hal ini dilatar belakangi oleh masyarakat Jawa sebagai pekerja perkebunan di Suriname mengalami kehidupan yang tidak layak, hingga bertahun-tahun dalam kemiskinan dan pembodohan. Yang akhirnya masyarakat Jawa Suriname mempengaruhi politik Suriname dengan melakukan interaksi ke masyarakat lain. Pengaruh tersebut akhirnya berimbas pada kebijakan pemerintah Indonesia pada waktu itu untuk menempatkan kantor perwakilan di Suriname, akan tetapi komisariat tersebut sejak tahun 1958/1964 ditutup sebagai akibat merenggangnya hubungan antara Indonesia-Suriname terputus. Kemudian tahun 1964 Kantor Perwakilan dibuka kembali pada tingkat Konsulat Jenderal. Hubungan Indonesia-Suriname meningkat sejak tahun 1975 setelah Suriname memperoleh kemerdekaan dari Belanda, dimana pemerintah R.I membuka kembali kantor perwakilannya pada tingkat Kedutaan Besar. Dengan dibukanya Kedutaan Besar milik pemerintah R.I di Suriname telah memberikan manfaat positif bagi kedua negara. Hubungan kerjasama tersebut didasari oleh beberapa kepentingan kedua negara.

1. Kepentingan Indonesia terhadap Suriname:

Suriname adalah negara yang memiliki pertalian darah dengan Indonesia, mengingat warga keturunan Jawa Suriname sebagai kunci hubungan antar negara

terbentuk dan membantu Suriname diberbagai bidang. Suriname sangat prospektif dalam investasi-investasi jangka pendek maupun panjang, banyaknya lahan-lahan yang belum diproduksi secara maksimal. Dan Indonesia sebagai investor dan pengekspor tetap menjaga dalam pembangunan Suriname, sedang Suriname juga sebagai penghubung produk-produk Indonesia dikawasan Karibia dan negara-negara di kawasan Amerika Latin.

2. Kepentingan Suriname dengan Indonesia:

Indonesia sebagai saudara tua Suriname yang memiliki catatan sejarah dan budaya sangat penting dalam perubahan dan kemajuan negara Suriname sampai saat ini. Suriname sebagai negara pengimpor tetap membutuhkan keberadaan Indonesia dalam investasinya Indonesia di Suriname.

Kantor Perwakilan pemerintah Republik Indonesia yang berada di Suriname menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, berfungsi sebagai berikut:

1. Melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia.
2. Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban: memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri; memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hokum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

3. Dalam hal warga negara terancam bahaya nyata, perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.⁵⁷

Di dalam kerangka diplomasi bilateral, Indonesia terus memperkuat kerjasama kemitraan strategis dengan negara-negara mitra utama, baik dalam lingkaran konsentris terdekat (di kawasan) maupun di luar kawasan. Indonesia secara aktif membahas dan menggali potensi kerjasama melalui berbagai forum seperti dalam kegiatan saling kunjung, pertemuan bilateral, regional dan multilateral antar pejabat tinggi negara serta pelaksanaan rutin Forum Konsultasi Bilateral (FKB), Sidang Komisi Bersama (SKB) dan kegiatan promosi TTI (*Trade, Tourism and Investment*). Selama tahun 2008, telah dilaksanakan sebanyak 18 kali forum Sidang Komisi Bersama (SKB), 7 diantaranya pada tingkat Menteri, dan 11 pada tingkat Pejabat Senior.

B.1. Kerjasama Di Bidang Politik

Hubungan kerjasama di bidang politik antar kedua negara didasari dengan adanya kepentingan politik Suriname terhadap Indonesia. Kerjasama politik terus meningkat termasuk dukungan negara Suriname secara konsisten terhadap posisi dan pencalonan keanggotaan Indonesia di berbagai forum multilateral maupun internasional. Hubungan baik kedua negara ditandai dengan saling kunjung antara ke dua pemimpin negara, baik pada tingkat kepala negara, tingkat menteri maupun

⁵⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

tingkat parlemen. Pada awal bulan April 2002 Suriname membuka kantor Kedutaan Besarnya di Jakarta dan pada tanggal 02 Agustus 2002 Sahidi Rasam di lantik oleh Presiden Ronald Veneetian menjadi Duta Besar LBBP Suriname pertama di Indonesia, sedangkan pada tanggal 08 November 2002 Dubes Sahidi Rasam menyerahkan kepercayaan kepada Presiden R.I sebagai Dubes LBBP Suriname di Jakarta. Kemudian pada tanggal 04 Desember 2002 Suparmin Sunjoyo juga menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Suriname sebagai Dubes R.I untuk Suriname.⁵⁸

Kerjasama antara ke dua negara juga dipererat dengan penyelenggaraan Sidang I Komisi Bersama (Joint Commission) Indonesia-Suriname diadakan di Paramaribo pada tanggal 3-5 April 2003 dan Sidang II diadakan di Yogyakarta pada tanggal 22 November 2004. Komisi Bersama telah membahas berbagai bidang kerjasama yang dapat memberi manfaat kepada ke dua belah pihak, diantaranya di bidang perdagangan dan UKM (Usaha Kecil Menengah), investasi, pertanian, perikanan, komunikasi dan informasi, sosial budaya, pendidikan, pemuda dan olah raga, serta pertahanan dan keamanan. Sementara itu, penyelenggaraan Sidang III Komisi Bersama diadakan di Paramaribo pada tanggal 14-16 Mei 2007. Sidang IV Komisi Bersama telah diselenggarakan di Solo bertempat di Hotel Lorin pada tanggal 9-10 November 2009.⁵⁹ Hal tersebut nantinya di harapkan dapat mempelancar kerjasama kedua negara yang sudah

⁵⁸ “*Kerjasama Bilateral*”, <http://www.kemlu.go.id/Lists/BilateralCooperation/DispForm.aspx?ID=43>.

Diakses 14 Maret 2011

⁵⁹ *Ibid.*

lama tercipta, dengan saling memberikan kepercayaan dalam pelaksanaan kerjasama bilateral.

B.2 Kerjasama Dalam Perekonomian Dan Perdagangan

Hubungan ekonomi perdagangan Indonesia-Suriname pada tahun 2002 mengalami permasalahan, dikarenakan terpengaruh oleh perkembangan perekonomian dalam negeri Suriname yang dilanda krisis ekonomi, dimana kurs mata uang Gulden Suriname (SF) dalam periode tahun 2002 terus mengalami kemerosotan terutama terhadap US\$ dan Euro. Fluktuasi tersebut telah menimbulkan naiknya harga-harga baik harga kebutuhan bahan pokok maupun harga barang dan jasa, tarif pelayanan umum, sampai pada tuntutan kenaikan gaji baik dari kalangan pemerintah maupun swasta. Kondisi tersebut semakin parah setelah sektor produksi menurun tajam.

Perusahaan-perusahaan milik negara berada dalam situasi yang memprihatinkan. Sebagai sama-sama dikategorikan sebagai negara berkembang, tidak dipungkiri lagi komoditas ekspor kedua negara tersebut memiliki banyak persamaan. Selama ini hubungan ekonomi perdagangan antara kedua negara lebih banyak berlangsung pada sektor perdagangan langsung antara pengusaha kedua negara dengan keaktifan yang lebih di dominasi dari para pengusaha asal Suriname. Para pengusaha Suriname melakukan kontak dagang langsung ke Indonesia sambil memanfaatkan masa liburan. Peluang untuk meningkatkan hubungan perdagangan ke dua negara adalah usaha makanan khas Indonesia (Jawa) yang cukup baik.

Ada fanatisme kalangan Suriname keturunan Jawa terhadap produk Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pangsa pasar tradisional produk Indonesia masih cukup besar dan adanya keinginan mengambil tenaga kerja asal Indonesia, yang dipandang cukup rajin dan tidak banyak menuntut. Suriname merupakan negara anggota CARICOM yang penting, dan memiliki kedudukan strategis dalam pemasaran produk Indonesia di kawasan Karibia. Posisi negara ini menjadi lebih penting mengingat masih banyak produk Indonesia yang masuk ke kawasan Karibia melalui negara ketiga. Sementara itu, investasi Suriname ke Indonesia masih belum memungkinkan. Lebih dimungkinkan adalah investasi Indonesia ke Suriname, terutama di bidang perkayuan.

Sementara itu pada tahun 2010 total perdagangan kedua negara mencapai USD 4.797.400 dengan surplus sebesar USD 4.567.500 untuk Indonesia. Komoditi ekspor Indonesia ke Suriname adalah tekstil dan pakaian jadi, furniture, peralatan rumah tangga, peralatan plastik, sepatu, makanan, bumbu masak dan alat musik. Sedangkan komoditi impor Indonesia dari Suriname tidak terlalu banyak dan tidak menentu. Hingga saat ini, masih sulit bagi Suriname mengadakan investasi di Indonesia, sebaliknya peluang Indonesia untuk berinvestasi di Suriname diantaranya dibidang perkayuan, pertambangan emas dan minyak, perkebunan kelapa sawit, pohon jarak dan pisang, serta perumahan. Kendala pada hubungan perdagangan kedua negara dikarenakan masih dihadapkannya pada berbagai hambatan, diantaranya adalah masih kurangnya kontak langsung antar pengusaha kedua negara, jarak yang cukup jauh dan belum

adanya hubungan pelayaran secara langsung, dan adanya saingan dari negara-negara Amerika Latin dan Asia Lainnya, terutama RRC dan Jepang.

Tabel 3.1

Neraca perdagangan RI-Suriname 2006-2010 (dalam USD)

Tahun	Ekspor	Impor	Neraca	Total
2006	2.615.100	58.000	2.557.000	2.673.200
2007	3.144.400	1.000	3.143.400	3.145.300
2008	4.707.900	2.600	4.705.300	4.710.500
2009	4.814.000	45.300	4.768.700	4.859.300
2010	4.682.500	115.000	4.567.500	4.797.400

Sumber: Kementerian Perdagangan R.I

Berdasarkan tabel neraca perdagangan Indonesia-Suriname dapat diketahui selama kurun waktu 2006-2010 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini memberikan pengaruh penting terhadap kemajuan perkembangan kerjasama kedua negara terutama pada bidang perekonomian. Meskipun pada kenyataannya perkembangan ini dapat dibuktikan bahwa kerjasama kedua negara dapat berjalan dengan lancar, meskipun pada kenyataannya produksi barang yang terdapat di negara Suriname sebagian besar adalah ekspor. Namun tidak menutup kesempatan bagi Indonesia selain dapat meningkatkan kerjasamanya dengan Suriname, tetapi dengan melalui Suriname dapat meningkatkan produksi ekspornya ke wilayah Amerika Selatan dan Karibia. Meskipun dalam perdagangan yang dilakukan Indonesia ke Suriname relative

kecil dari keseluruhan perdagangan internasional yang dilakukan selama ini, tidak mempengaruhi hubungan antar kedua negara yang sama-sama mempunyai kepentingannya sendiri. Kurun waktu selama 5 tahun kerjasama perdagangan antar kedua negara tersebut mengalami peningkatan, telah membuka peluang bagi Indonesia memperluas kerjasamanya dalam meningkatkan kegiatan ekspornya selain di Suriname tetapi juga ke wilayah Amerika Selatan dan Karibia.

B.3 Kerjasama Dalam Bidang Sosial Dan Budaya

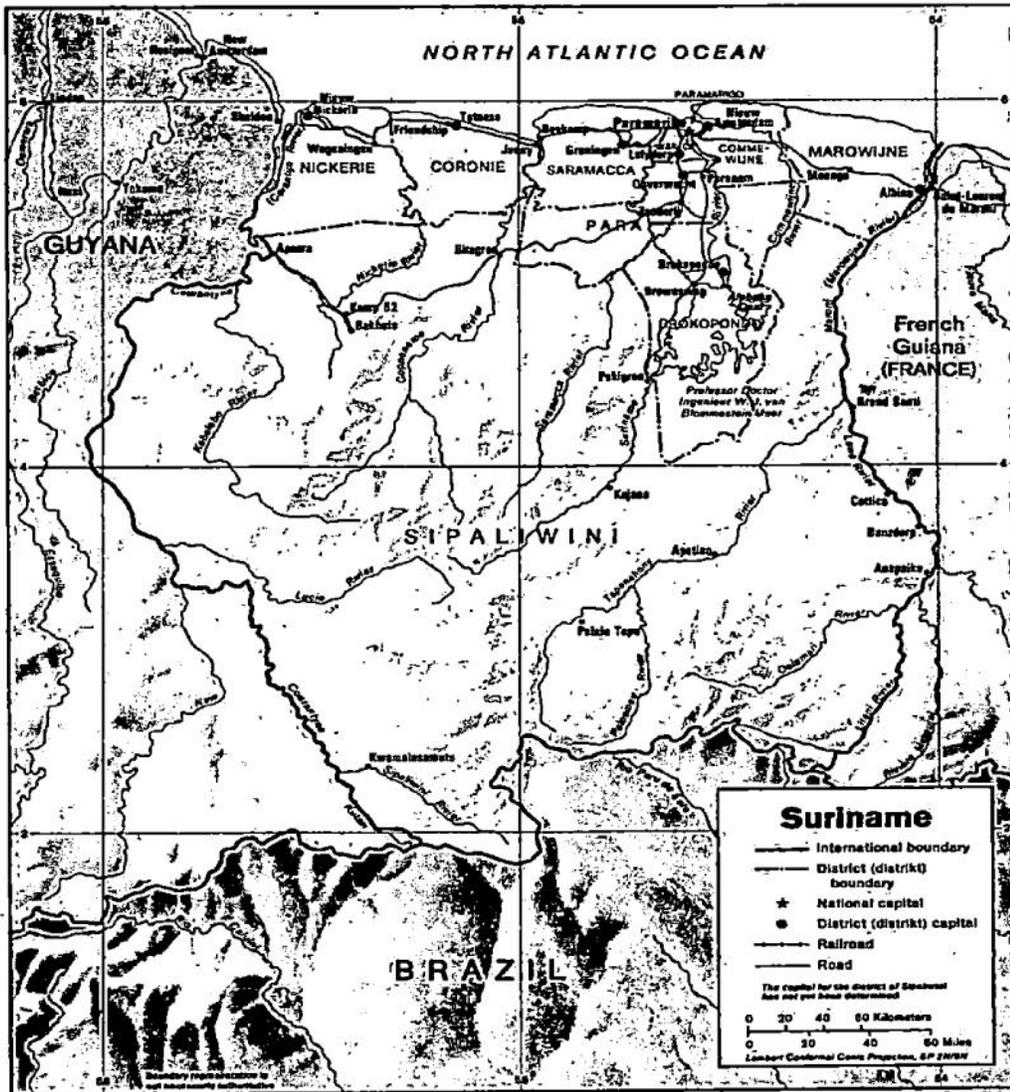
Indonesia sebagai saudara tua Suriname menjadikan kerjasama bidang sosial budaya faktor utama dalam peningkatan hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang. Melalui pendekatan sosial budaya dalam kerjasama diharapkan dapat mempermudah hubungan di bidang lainnya. Disisi lain kerjasama sosial budaya memberikan keterikatan yang berawal dari sejarah khususnya masyarakat Jawa Suriname. Sosial budaya dalam kerjasama kedua negara mempunyai peran sangat berarti dan memberikan kedudukan strategis bagi Indonesia dalam pemasaran produk di kawasan Karibia.

Dengan adanya keberadaan masyarakat turunan Jawa di Suriname yang mempertahankan budaya dan tradisi Jawa menjadikan salah satu modal untuk memperkuat kerjasama Indonesia dan Suriname di berbagai bidang. Indonesia dan Suriname telah memiliki persetujuan kebudayaan yang di tandatangani pada tanggal 15 Oktober 1997 di Jakarta. Kegiatan sosial budaya kedua negara berlangsung dengan memanfaatkan Suriname-Indonesia *Friendship Association*. Peningkatan kerjasama Indonesia-Suriname dalam segala bidang terus diupayakan

dengan memanfaatkan potensi kelompok etnis yang berada di Suriname, seperti etnis Hindustan, Kreol, Amerindian dan khususnya pada etnis keturunan Jawa.

Ilustrasi Negara Republik Suriname

Gambar 3.1



Sumber: <http://renydjowoelsyncr.blogspot.com/2011/01/suriname-dan-etnis-jawa-keturunan.html>

Suriname 100 Guilders

Gambar 3.2



Sumber: <http://www.taxfreegold.co.uk/suriname.html>